

EVALUASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIIL NEGARA

Dede Riansyah

Email: dederiansyah50@gmail.com

STISIP Widyapuri Mandiri

Abstract

This study aims to evaluate the Additional Income policy for State Civil Apparatus (ASN) at the Regional Secretariat of Indramayu Regency. This policy is implemented with the aim of improving employee welfare based on workload, place of duty, working conditions, professional scarcity, work performance, and other objective considerations. The research method used is descriptive research with a qualitative approach, involving observation and interviews with informants who have knowledge related to the Additional Income policy. The results of this policy evaluation show that the Income Supplement policy has increased the attendance rate of employees and provided economic assistance to them. However, there are some issues that need attention, such as the lack of professionalism of employees and jealousy related to the amount of additional income that is not based on performance. In addition, responsiveness in the disbursement of additional income is still not optimal, and there are delays in the disbursement process. Nevertheless, this policy has provided significant benefits for the welfare of the State Civil Apparatus at the Indramayu Regency Regional Secretariat, especially in facing the increasing cost of living needs. This evaluation can be the basis for policy improvement so that it can be more effective, efficient, and appropriate in achieving its initial objectives, namely improving the welfare and performance of ASN employees.

Keywords: Policy Evaluation, Additional Income, State Civil Apparatus

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Kebijakan ini diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi dan wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan terkait dengan kebijakan Tambahan Penghasilan. Hasil evaluasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan Tambahan Penghasilan telah meningkatkan tingkat kehadiran pegawai dan memberikan bantuan ekonomi kepada mereka. Namun, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya profesionalisme pegawai dan kecemburuan terkait dengan nominal tambahan penghasilan yang tidak berdasarkan kinerja. Selain itu, responsivitas dalam pencairan tambahan penghasilan masih belum optimal, dan ada keterlambatan dalam proses pencairan.

Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, terutama dalam menghadapi biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan agar dapat lebih efektif, efisien, dan tepat dalam mencapai tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai ASN.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Tambahan Penghasilan, Aparat Sipil Negara

Submitted: 23-09-2023| Accepted: 23-09-2023| Published: 30-09-2023

1. Pendahuluan

Pemerintah suatu negara memiliki tujuan nasional yang luas dan ambisius, dan untuk mencapai tujuan ini, diperlukan peran yang krusial dari pegawai negeri atau Aparat Sipil Negara (ASN). ASN memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, yang mencakup pelayanan publik, pembangunan, dan berbagai tugas pemerintahan lainnya. Mereka berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan pemerintah. Lebih penting lagi, ASN memiliki kewajiban moral dan etika untuk selalu mempertanggungjawabkan tugas-tugas mereka kepada publik secara adil dan transparan. Dalam menjalankan tugasnya, ASN harus bertindak secara netral, tanpa memihak satu golongan tertentu, baik dari segi agama, suku, golongan, maupun politik.

Aparatur Sipil Negara bukan hanya menjadi bagian dari mesin pemerintahan, tetapi juga merupakan penggerak utama dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan kebijakan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas dan prestasi kerja yang tinggi, pemberian Tambahan Penghasilan (TP-PNS) telah dianggap sebagai langkah yang perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal penjelasannya, ditegaskan bahwa pemberian tambahan penghasilan harus didasarkan pada prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.

Selanjutnya, Kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menguatkan prinsip ini, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil

dengan pertimbangan yang obyektif, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam panduan ini juga dijelaskan bahwa tujuan pemberian TP-PNS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya.

Atas dasar kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini secara rinci mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, dengan menekankan kriteria seperti beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.

Dengan adanya kebijakan Tambahan Penghasilan bagi ASN, diharapkan bahwa para pegawai akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas kebijakan Tambahan Penghasilan bagi ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan awalnya, serta untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin masih ada dalam implementasinya.

2. Kajian Pustaka

Kebijakan publik adalah konsep yang telah menjadi bagian integral dalam dunia akademis dan pemerintahan. Menurut Sahya (2014:33), kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan yang memiliki dampak luas dan mengikat bagi banyak orang pada tingkat strategis atau bersifat garis besar. Keputusan ini dibuat oleh pemegang otoritas publik, yang pada dasarnya merupakan individu atau entitas yang memiliki mandat dari publik atau masyarakat luas. Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang telah diberikan mandat oleh masyarakat.

Namun, perlu diingat bahwa definisi kebijakan publik dapat bervariasi sesuai dengan perspektif dan pendekatan yang digunakan oleh berbagai ahli. Suharno (2013:3) mencatat bahwa ada banyak batasan dan definisi mengenai kebijakan publik, dan setiap ahli memiliki pemahaman dan makna yang berbeda tentang konsep ini. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman dalam pemahaman mengenai kebijakan publik.

Sulistio (2012:3) menggambarkan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah bersama aktor-aktor elit politik. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan masyarakat. Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan alat strategis yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Nugroho (2011:96) menganggap kebijakan publik sebagai strategi untuk membimbing masyarakat dari masa awal, melalui masa transisi, menuju masyarakat yang diinginkan atau dicita-citakan. Ini menggambarkan peran penting kebijakan dalam menciptakan perubahan sosial yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam konteks evaluasi kebijakan publik, Arikunto (2013:36) menggambarkan evaluasi sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja suatu kebijakan atau program. Informasi ini kemudian digunakan untuk menentukan alternatif kebijakan yang lebih tepat dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Evaluasi kebijakan publik merupakan langkah akhir dari implementasi kebijakan tersebut, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan awalnya.

Dunn, seperti yang dikutip oleh Sahya (2014:279), menyajikan enam kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja kebijakan publik. Kriteria ini mencakup efektivitas, efisiensi, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi mengevaluasi sejauh mana kebijakan mencapai tujuan tersebut dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Kesamaan mengacu pada distribusi dampak kebijakan yang adil dan merata di seluruh masyarakat. Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan dapat menanggapi perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Ketepatan mencerminkan sejauh mana kebijakan memecahkan masalah yang ada dengan tepat.

Dalam konteks penelitian ini, kajian teori mengenai kebijakan publik dan evaluasi kebijakan akan digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi kebijakan Tambahan Penghasilan bagi ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Penelitian ini akan menggunakan kriteria-kriteria evaluasi yang telah disebutkan sebelumnya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut, serta untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin masih ada dalam implementasinya.

3. Metode

Metode penelitian adalah landasan yang sangat penting dalam setiap penelitian, karena metode tersebut akan memengaruhi bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan bagaimana kesimpulan akhir ditarik. Dalam penelitian ini, penulis telah memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan

metode ini memiliki dasar yang kuat dalam upaya menyajikan data yang sistematis dan akurat terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk mendalami ke dalam pemahaman dan konteks yang lebih luas terkait kebijakan Tambahan Penghasilan bagi ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

Menurut para ahli, pendekatan kualitatif dalam penelitian memiliki keunggulan dalam menggali pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Berikut adalah pendapat beberapa ahli tentang pendekatan kualitatif:

Denzin dan Lincoln (2005): Mereka menyatakan bahwa pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman konteks sosial, nilai-nilai, sikap, dan persepsi individu, yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang terdapat dalam data.

Creswell dan Poth (2017): Menurut mereka, pendekatan kualitatif cocok untuk penelitian yang mengeksplorasi kompleksitas suatu fenomena atau untuk menggali perspektif yang beragam dari partisipan dalam penelitian.

Merriam (2009): Ia mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif membantu peneliti memahami berbagai dimensi dari pengalaman manusia, termasuk perasaan, nilai-nilai, dan pemahaman yang mendasarinya.

Pemilihan metode observasi dan wawancara juga sesuai dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Observasi memungkinkan penulis untuk mengamati situasi secara langsung di lapangan dan mencatat detail-detail penting yang mungkin sulit ditemukan melalui metode kuantitatif. Sementara itu, wawancara memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari sudut pandang para informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung tentang kebijakan Tambahan Penghasilan.

Pemilihan informan yang benar-benar memiliki pengetahuan yang relevan dengan latar belakang penelitian juga merupakan langkah penting dalam memastikan validitas dan akurasi data yang dikumpulkan. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian dan memberikan kesempatan untuk menjelajahi berbagai aspek kebijakan dengan lebih mendalam dan komprehensif.

4. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Melakukan evaluasi adalah suatu keharusan apabila suatu kebijakan sudah ditetapkan dan di implementasikan, sehingga dengan adanya evaluasi kebijakan tersebut

maka kita bisa mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah berjalan dengan tujuan awalnya dibuat kebijakan tersebut atau tidak. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu dengan indikator - indikator seperti : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan.

Indikator pertama adalah efektivitas, dimana untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut tercapai. Dan untuk mengukur keefektivitas tersebut maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan apa yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan Tambahan Penghasilan bagi ASN, dan tujuannya adalah dengan adanya tambahan penghasilan diharapkan mampu meningkatkan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara, meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara, meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sehingga Aparatur Sipil Negara fokus terhadap kerjanya dengan kata lain lebih profesional.

Setelah mengetahui tujuan utama dari kebijakan Tambahan Penghasilan bagi ASN, kita bisa mengukur sejauhmana tujuan tersebut tercapai. Dari hasil penelitian penulis disimpulkan Tambahan penghasilan memang membuat tingkat kehadiran pegawai meningkat, dan membantu perekonomian pegawai, akan tetapi disisi lain masih terdapatnya masalah seperti profesionalisme pegawai, dan kecemburuan para pegawai terhadap nominal tambahan penghasilan pegawai.

Indikator ke dua adalah efisiensi, kata efisiensi memiliki pandangan yang berbeda dari setiap orangnya, adanya yang mengatakan efisiensi adalah waktu, ada juga yang mengatakan efisiensi adalah dana, dan ada juga yang mengatakan efisiensi adalah jumlah pegawai. Berbicara efisiensi disini penulis akan lebih berfokus terhadap dana atau uang, sesuai dengan tema yang diambil penulis. Pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu di berikan sesuai dengan Jabatannya atau golongan, dengan alasan tanggung jawab dari setiap golongan itu berbeda begitupun dengan jenis pekerjaannya. Akan tetapi ada beberapa ASN kurang setuju dikarenakan apabila hanya melihat jenis golongan atau jabatan rasa kurang adil, seharusnya berdasarkan kinerja pegawai, tingkat kehadiran pegawai atau bahkan prestasi pegawai menjadi acuan untuk pemberian tambahan penghasilan pegawai sehingga para pegawai akan selalu termotivasi untuk meningkatkan lagi kinerjanya.

Indikator ke tiga adalah kecukupan, dengan adanya Tambahan Penghasilan bagi ASN diharapkan menjadi suatu solusi agar meningkatkan kedisiplinan, kesejahteraan dan

meningkatkan prestasi kerja. Dari jawaban informan disimpulkan bahwa kebijakan Tambahan Penghasilan dapat memberikan solusi terhadap kesejahteraan para pegawai dan adanya peningkatan kedisiplinan pegawai.

Indikator ke empat adalah pemerataan, Pemberian tambahan penghasilan setiap Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu tidak sama atau rata, sesuai dengan jenis Jabatan atau golongan pegawai. Sesuai dengan hasil dari pengamatan dan data-data atau peraturan-peraturan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian, semua Aparatur Sipil Negara mendapatkannya berdasarkan jenis jabatannya, karena sudah diatur oleh Perundang-undangan, jadi walaupun nominal yang diterima pegawai berbeda tetapi beban kerjanya sama.

Indikator ke lima adalah responsivitas, Responsivitas disini adalah seberapa tepat Tambahan penghasilan diberikan atau dicairkan kepada Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Karena apabila tidak tepat waktu pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara akan berdampak kepada keseriusan atau kesungguhan para Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya. Waktu Pemberian Tambahan Penghasilan setiap bulannya tidak tetap, karena pencairannya sesuai pengajuan dari bendahara, apalagi kalau awal tahun terkadang pencairannya terlambat di bulan ketiga (dirapel menjadi 3 bulan).

Indikator ke enam adalah ketepatan, Kebijakan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya kedisiplinan, prestasi kerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara. Dari hasil pengamatan dan wawancara terkait ada tidaknya manfaat yang dihasilkan dari kebijakan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara penulis menyimpulkan sudah sangat bermanfaat, apalagi dimasa sekarang yang serba sulit, dimana biaya kebutuhan hidup sehari-hari semakin naik. Jadi sangat tepat sekali ketika adanya tambahan penghasilan bagi para Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

5. Kesimpulan

Efektivitas Kebijakan: Evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan Tambahan Penghasilan telah berhasil meningkatkan tingkat kehadiran pegawai dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian mereka. Namun, ada catatan terkait masalah

profesionalisme pegawai yang perlu diperbaiki, serta perasaan kurang adil dalam penentuan tambahan penghasilan berdasarkan golongan jabatan.

1. Efisiensi Kebijakan

Penentuan tambahan penghasilan berdasarkan jabatan, daripada kinerja, telah menjadi perdebatan. Sebagian pegawai berpendapat bahwa penentuan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja akan lebih adil. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan perubahan dalam penentuan tambahan penghasilan.

2. Kecukupan Kebijakan

Kebijakan Tambahan Penghasilan dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan disiplin kerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan manfaat positif bagi ASN.

3. Perataan Kebijakan

Meskipun nominal tambahan penghasilan berbeda-beda, kebijakan ini menerapkan perataan dalam hal penentuan tambahan penghasilan, yaitu berdasarkan jenis jabatan atau golongan pegawai.

4. Responsivitas Kebijakan

Responsivitas dalam pencairan tambahan penghasilan perlu diperbaiki. Waktu pencairan yang tidak tetap dan terkadang terlambat dapat mempengaruhi keseriusan dan kesungguhan pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, proses pencairan perlu ditingkatkan.

5. Ketepatan Kebijakan

Kebijakan Tambahan Penghasilan dianggap sangat bermanfaat, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kebijakan ini telah memberikan dukungan bagi kesejahteraan ASN dan dianggap tepat adanya.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa kebijakan Tambahan Penghasilan bagi ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu telah memberikan manfaat signifikan, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti penentuan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja, responsivitas dalam pencairan, dan aspek-aspek yang memastikan adanya keadilan dalam kebijakan ini. Evaluasi yang berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa kebijakan ini tetap efektif dan efisien sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Rian Nugroho. 2015. *Kebijakan Publik Dinegara-negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Pustaka Setia
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Sulistio, Eko Budi. 2012. *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Syafiie, I. K. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Wahab. 2014. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Cempaka Putih. CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*